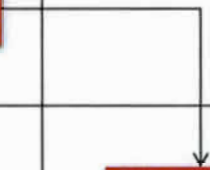
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-117.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENCARIAN/UNDUH DATA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan Partai Politik 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan Partai Politik
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. 2. 3.	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN/PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCARIAN/UNDUH DATA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu			Keterangan
		Pemohon	Dirjen AHU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pencarian/unduh data kepengurusan partai politik				1 Hari	Permohonan pencarian unduh data kepengurusan partai politik	Pemohon mengisi data isian terkait permohonan pencarian/unduh data kepengurusan partai politik
2	Melakukan pembayaran PNBP			Bukti pembayaran PNBP			Pemohon membayar PNBP sebesar Rp. 50.000,-
3	Memproses permohonan						Data diproses oleh system
4	Menerima data kepengurusan partai politik		